

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menyadari pemberdayaan usaha kecil menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi dan peran usaha kecil sangatlah besar kontribusinya sebagai pelaku usaha nasional, dalam tata perekonomian nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan melihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, devisa nasional dan investasi nasional.

Kejadian tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri, hal ini ditunjukkan dengan apresiasi terhadap nilai rupiah, dimana pada saat kondisi perekonomian di Indonesia mengalami krisis diberbagai bidang akan tetapi pada kegiatan usaha kecil ini malah bisa dikatakan relatif stabil karena usaha kecil ini memiliki pangsa pasar di dalam negeri pada umumnya dan kondisinya lebih kuat dibanding kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan pasar luar negeri.

Usaha kecil memiliki kelemahan yang membuatnya sulit untuk berkembang dibandingkan dengan usaha-usaha besar. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut yaitu terbatasnya modal yang dimiliki, manajemen yang lemah, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu dalam pembentukan jaringan usaha dan akses pasar yang minim.

Usaha kecil dan mikro mempunyai dua masalah utama dalam aspek finansial yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang. Modal awal biasanya bersumber dari tabungan pribadi para pelaku usaha, sedangkan modal kerja dan finansial jangka panjang diperoleh dari pinjaman kredit. Pinjaman kredit sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil untuk memperluas unit usaha dan juga untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, sehingga menambah laba dari usaha itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan keputusan yang mengatur tentang pengembangan usaha kecil, diantaranya adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk lebih memperjelas keputusan sebelumnya maka pemerintah mengeluarkan kembali Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/KMK.061/1996 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana perlu penyesuaian terhadap besarnya bagian pemerintah atas laba BUMN untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi.

Pemerintah melalui Kementrian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan pengembangan ekonomi serta kondisi lingkungan sekitar BUMN. Program PKBL terdiri dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program kemitraan

merupakan suatu program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba perusahaan setelah pajak maksimal 2%. Program kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil di wilayah regional perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-01/MBU.S/2009 tentang wilayah binaan dan BUMN Koordinator PKBL Tahun 2009. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1Milyar dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*). Sedangkan program bina lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi perusahaan melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba perusahaan setelah pajak maksimal 2%. Program bina lingkungan diberikan dalam bentuk hibah khusus bagi masyarakat dalam bentuk bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.

Berbagai program ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan prioritas sektor-sektor yang memiliki daya tampung tenaga kerja yang tinggi seperti pada sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan lainnya.

Indonesia ditargetkan menjadi negara penghasil terbesar produksi perikanan di dunia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Untuk mendukung program

tersebut diperlukan keseriusan dalam hal peningkatan produktivitas perikanan di segala bidangnya termasuk salah satunya mengoptimalkan lahan-lahan yang selama ini pasif menjadi lebih produktif.

Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang mempunyai sungai yang diberi nama Sungai Betuah yang berbeda dari sungai yang lainnya, termasuk lahan yang pasif selama ini. Sungainya berupa genangan air dengan arus tenang, memiliki salinitas air 5 per mil yang masih toleransi untuk budidaya ikan nila, tidak tercemar oleh limbah pabrik dan rumah tangga serta kondisi alam yang mendukung di sekitarnya memiliki peluang yang baik untuk diproduktifkan menjadi sentra pembudidaya keramba ikan nila. Kondisi yang cocok untuk budi daya ikan nila ini seharusnya membuat produktivitas Desa Sungai Ular ini dalam produksi ikan nila juga besar, namun kondisi sebenarnya adalah produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh.

Selama ini sungai Betuah tidak dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat sekitar. Pada tahun 2008 hanya terdapat 2 keramba ikan nila saja yang ada di sungai tersebut dengan produksi 1200 kg dan itupun merupakan bantuan dari dinas perikanan setempat sebagai langkah awal untuk merangsang pembudidaya yang lain. Langkah ini pun berhasil dilakukan dibuktikan dengan adanya penambahan keramba di tahun 2009 menjadi berjumlah 17 keramba dengan produksi 25000 kg. Kemudian pada tahun 2010 jumlah keramba terus bertambah menjadi 60 buah dengan produksi 65000 kg dan pada tahun 2011 bertambah lagi menjadi 100 keramba dengan produksi mencapai 135500 kg. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini :

Tabel 1. Tabel Perkembangan Produksi Budidaya Keramba Ikan Nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang

No	Tahun	Jumlah Keramba	Produksi (Kg)
1	2008	2	1200
2	2009	17	25000
3	2010	60	65000
4	2011	100	135500

Sumber : Kelompok Budidaya Keramba Ikan Nila Sungai Betuah (2013)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah produksi dapat semakin ditingkatkan dengan menambah luas lahan dan input produksi lainnya. Hasil yang sudah dicapai ini dirasakan tidak begitu memuaskan bila dibandingkan dengan potensi sungai betuah yang cukup luas yang seharusnya bisa menciptakan lebih banyak lagi jumlah keramba dan pembudidaya ikan nila. Akan tetapi pada kenyataannya sulit diwujudkan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal kerja yang dimiliki para pembudidaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan cara untuk meningkatkan produksi pembudi daya ikan nila yaitu dengan memberikan suntikan dana segar berupa pemberian pinjaman kredit dengan bunga yang ringan. Diharapkan dengan adanya tambahan modal kerja ini para pembudidaya ikan nila dapat menambah unit usahanya guna meningkatkan produksinya secara maksimal sehingga penerimaan dan pendapatan yang diperoleh juga ikut meningkat dan tentu saja berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Oleh karena itu, Bank Mandiri Persero (Tbk) Langkat sebagai salah satu perusahaan BUMN mendirikan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). PKBL ini membina usaha-usaha kecil termasuk dibidang perikanan yaitu

pembudidayaan keramba ikan nila yang ada di kecamatan Secanggang kabupaten Langkat. PKBL ini menyalurkan kredit kepada pembudidaya keramba ikan nila di desa Sei. Ular kecamatan Secanggang dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya. Selain memberikan kredit Bank Mandiri juga memberikan pembinaan seperti pelatihan, pameran dan lain-lain.

Pemberian dana ini tidak serta merta diberikan begitu saja tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkannya. Untuk itu, Bank Mandiri dalam hal ini memberikan persyaratan dan ketentuan yang sama dengan persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan bank dalam hal pemberian kredit tetapi dengan jumlah pinjaman kredit sebesar 15 juta saja dengan agunan surat tanah atau surat berharga lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pelaku usaha mempunyai niat dan motivasi untuk menjalankan usahanya dengan baik serta memiliki kemauan untuk membayar pinjamannya kepada bank agar dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada para pelaku usaha lainnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengulas permasalahan tersebut dalam suatu bentuk tesis dengan judul “Analisis Komparatif Pemberian Kredit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Terhadap Produksi dan Pendapatan Pembudidaya Keramba Ikan Nila (*Oreochromes sp*) di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Langkat”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pemberian kredit PKBL terhadap produksi dan pendapatan

pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang.

Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jumlah produksi pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang sebelum dan sesudah menerima kredit PKBL?
2. Bagaimana tingkat pendapatan pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang sebelum dan sesudah menerima kredit PKBL?
3. Bagaimana nilai fungsi produksi pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang sebelum dan sesudah menerima kredit PKBL?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis produksi pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang sebelum dan sesudah adanya pemberian kredit PKBL.
2. Untuk menganalisis pendapatan pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang sebelum dan sesudah adanya pemberian kredit PKBL.
3. Untuk menganalisis nilai fungsi produksi pembudidaya keramba ikan nila di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang sebelum dan sesudah menerima kredit PKBL.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi bagi pembudidaya ikan nila tentang pentingnya penggunaan kredit yang tepat dan produktif untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah atau dinas pertanian setempat dalam mengalokasikan dana pinjaman kredit kepada sub sektor lainnya terutama di bidang pembudidaya ikan nila agar terus maju dan berkembang menjadi daerah sentra penghasil ikan nila di Kabupaten Langkat.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PKBL Bank Mandiri Persero (Tbk) Langkat dalam mengambil kebijakan dan keputusan khususnya dalam rangka menyalurkan kredit kepada bidang usaha kecil lainnya.
4. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan peneliti terutama mengenai pengalokasian kredit dibidang perikanan dan usaha kecil mikro lainnya.
5. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya pada bidang yang sama agar dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.